

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Ruslan. 2023. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, A. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshidique, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Immanuel, Victor. 2013. *Konsep Uji Materil*, Setara Press, Malang.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media, Yogyakarta.
- J Kaloh, 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, L. 2010. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel): Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*. Universitas Trisakti, Jakarta.
- M Hadjon, Philipus. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muddick, 2004. *Decentralization an Development (Desentralisasi Dalam Praktek)*, Pustaka Kendi, Yogyakarta.
- Nurcholis, 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* , Grasindo, Jakarta.
- Poernomo, 2017. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Razak, Abdul. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebiakan Dalam Hukum Administrasi negara*, Litera Republik Institute, Yogyakarta.
- HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo. Jakarta.

P Sibuea, Hotma. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Erlangga, Jakarta

Jurnal

Amar Wahyudi, F. S. 2022. Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Perundang-undangan. *Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 184.

Edward, M. d. 2018. Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkup . *Jurnal Sinar Manajemen Volume 5 Nomor 2*, 119.

Fauzi, A. 2019. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan . *Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16/No. 1*, 127-129.

Gandara, M. 2020. Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum Volume 2 Nomor 3*, 93-97.

Hanum, C. 2020. Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia . *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 140.

Kastanya, F. A. 2021. Surat Edaran Sebagai Instrumen Administrasi Negara Di Masa Pandemi Covid-19 . *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 792.

Kurniati, S. 2022. Kedudukan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/Hk.04/III/2020 dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja dan Keberlangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Kosmik*, 20-21.

Marwi, A. 2016. Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah . *Jurnal IUS*, 542.

Pattinasarany, Y. 2022. Keabsahan Surat Edaran yang Muatan Materinya Bersifat Pengaturan dan Sanksi. *Jurnal Saniri*, 32.

Rahmat Andika, A. J. 2019. Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. *Alauddin Law Development*, 34.

Rio Trifo Inggiz, T. K. 2019. Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . *Jurnal Dialektika Hukum*, 19-23.

Rizari, F. R. 2019. Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa CUti Kampanye Kepala Daerah Petahana. *Jurnal Manajemen Pemerintahan* , 89.

Widiarto, A. E. 2019. Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi . *Jurnal Konstitusi Vol 16 No 1*, 29-30.

Skripsi

Ferizko, A. (n.d.). Pelaksanaan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penentuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. *Universitas Lancang Kuning Skripsi* , 32.

Hadinata, K. 2014. Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Walikota Pare Pare . *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Skripsi*, 49.

Marwi, A. 2016. Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah . *Jurnal IUS*, 542.

Muthi'ah Maizaroh, 2023, Prosedur Pemilihan Akademisi Sebagai Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Skripsi, Universitas Hasanuddin. Hlm. 65.

Rahmat Andika, A. J. 2019. Analisis Pelaksanaan Mutasi Kepegawaian Oleh Kepala Daerah di Kabupaten Majene. *Alauddin Law Development*, 34.

Disertasi

Razak, A. (2005). Kedudukan Fungsi Peraturan Kebijakan tentang Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan . *Pascasarjana Fakultas Hukum Unhas Disertasi*, 34.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri 55 Tahun 2010 Tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Perihal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah Dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah;

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara K.26-30/V.100-2/99 Perihal Penjelasan atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah.